

Saya Terpaksa Mencalonkan Diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Mewakili DKI Jakarta



VISION

INDONESIA MERDEKA 100%

Daulat Rakyat Sepenuhnya melalui Demokrasi Tanpa Partai

MISSION POSSIBLE

kuasa formal



Teguh Sugiharto, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, penggagas DTP, dll.
hp: 08179923479, email: antipartai@yahoo.com, [facebook.com/tenguhonly](https://www.facebook.com/tenguhonly)
<http://facebook.com/groups/tanpapartai>

www.antipartai.wordpress.com

Question: Terpaksa mencalonkan diri...?

Answer: Ya, karena negara kita makin dikangangi oligarki (perselingkuhan kuasa-modal dan kuasa-politik) yang muara kencana di partai politik. Sementara suara-suara protes makin buanyak namun hanya menjadi seperti buih di lautan. Di saat kemerdekaan berbicara telah mwujud maka sebagian besar pembicaraan hanya akan dipandang sebagai "sampah demokrasi". Yang teriak tetap teriak, yang *nyopet* tetap *nyopet*.

Untuk mengangkat status kesampahan setiap pembicaraan diperlukan otoritas dan/atau popularitas. Maka terpaksa saya mencalonkan diri meski hanya berbekal suara lemah tanpa kapital agar suara-suara protes dapat lebih didengarkan. Kalau sepakat dengan gagasan, visi, misi dan tujuan yang saya paparkan *welcome*. Bentuk-bentuk dukungan mari kita bicarakan atau anda yang maju untuk memperjuangkan hal-hal yang saya uraikan juga boleh. Turut serta menyempurnakan draft Konstitusi Demokrasi Tanpa Partai pun sangat boleh.

Question: Nyari jabatan? Nyari duit?

Answer: Ya...! Kalau saya jadi anggota DPD RI apalagi kalau terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI maka saya memiliki aspek otoritas sehingga lebih didengarkan. Sehingga gagasan Demokrasi Tanpa -kuasa formal- Partai tidak lagi dipandang sebagai sampah demokrasi. Suara-suara protes rakyat demi mwujudnya Indonesia Merdeka 100% dapat saya suarkan lebih nyaring.

Ya...! Kalau jadi maka ada pendapatan dari jabatan yang cukup besar untuk membiayai sosialisasi Konstitusi DTP guna melibatkan rakyat dalam pembahasan dan penyempurnaan draft yang sudah saya siapkan. Membiayai pendidikan publik, turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu aktivis yang hendak demonstrasi menyuarakan kehendak rakyat, dan sejenisnya. Saya akan publikasikan laporan penggunaan uang tersebut secara terbuka dan siapapun boleh memeriksanya. Melawan oligarki kuasa-modal dan kuasa-politik memang memerlukan biaya. Bahkan mungkin tak cukup hanya dari pendapatan ke-DPD-an, tetapi setidaknya dapat mengubah riak menjadi gelombang.

Question: Apakah Demokrasi Tanpa Partai bermaksud membubarkan partai?

Answer: Tidak...! Ber-partai adalah termasuk dalam kebebasan berserikat dan berkumpul serta memperjuangkan cita bersama. DTP hanya menghendaki dihapusnya kuasa formal partai dalam menentukan kandidat jabatan publik apapun juga. DTP hendak menggeser medan politik dari partai menjadi individu perorangan. Partai sangat positif ketika kita harus melawan kolonialisme dan imperialisme, sangat bermanfaat ketika kita hendak menumbangkan seorang diktator-penindas rakyat.

Tetapi ketika kemerdekaan telah berhasil diraih maka tak lama kemudian justru akan berubah menjadi sarang kejahatan terorganisasi yang sulit dibuktikan kejahatannya. Maka mereka akan berjuang mempertahankan kuasa formal-nya. Partai *bertiwikrama* menjadi raksasa penindas yang melakukan apapun juga untuk mempertahankan kuasanya. Berzinah dengan kuasa-modal, berasyik masyuk di atas penderitaan rakyat. Karena *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Maka dari

itu *In God We Trust, The Others must be Controlled*. Maka selesai masa-nya bagi partai. Kuasa Formal-nya harus dicabut. Biarlah individu perorangan yang maju. Partai boleh membina dan mengkader mereka tetapi tetap pertanggungjawaban dan hubungan adalah rakjat dan wakil/pemimpin/pelayan-nya tanpa perlu mediasi partai.

Question: Apakah ada pakar hukum Tata Negara yang menerima konsepsi Demokrasi Tanpa –kuasa formal- Partai...?

Answer: Kalau yang pernah jumpa langsung dan memberikan dukungan serta apresiasi dan saran penyempurnaan ya pengamat konstitusi *Prof. Tisnaya Kartakusumah*, yang seringkali mengatakan bahwa kita ini tak punya Hukum Tata Negara, yang ada itu *Hukum Tata-keledai Negara* bukan Negara Keledai lho... ☺ Sama satu lagi **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie** mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu yang mengatakan: “**DTP: Sebuah gagasan liar, patut diapresiasi dan didukung. Saya sangat suka**”. Pakar yang lain saya ndak tahu dan belum pernah jumpa.

Question: DPD bisa diharapkan...?

Answer: Tidak...! Siapa yang mengharapakan DPD bisa melakukannya? DPD itu sejenis macam ompong yang dicabut taringnya oleh tangan-tangan partai bahkan dari kelahirannya. Semua yang sudah baca UUD 1945 harusnya memahami bahwa DPD adalah sejenis macan ompong. Maka saya hanya mencoba mengambil tampang ke-macan-annya saja. Agar wacana DTP tidak lagi dipandang sampah, agar ada duit untuk membiayai ini dan itu yang sudah saya sebutkan di atas to.... Malahan dalam draft Konstitusi DTP sudah saya uraikan gagasan tentang dihapuskannya DPR juga MPR dan DPR. Kita harus melakukan perubahan besar dan itu termasuk menggugat sakralitas terminologi-terminologi politik kita. Lembaga perwakilan rakjat akan disebut dengan Kongres Rakjat Indonesia, sistem distrik murni, satu distrik satu wakil sehingga jelas pertanggungjawaban dan arahnya. Sehingga tidak terjadi lagi partisipasi terputus (*participatus interuptus*).

Question: Lha terus untuk ke-DPD-annya sendiri gimana...?

Answer: DPD itu macan ompong...! Hanya punya hak memberi pertimbangan kepada DPR RI (yang dulu mencabuti taring DPD sejak lahirnya, yang dulu mengebiri DPD sejak awal kelahirannya) dalam sejumlah bidang yang sangat terbatas. Maka konsepsi yang akan saya perjuangkan dalam bidang terbatas itu sudah pula saya uraikan di draft Konstitusi DTP yang bisa diunduh dari <http://antipartai.wordpress.com> antara lain:

*)Pengelolaan Sumber Daya Alam: +)Meningkatkan penguasaan dan bagian negara, +)Sebagai pemilik sah menurut konstitusi maka rakjat harus pula mendapatkan bagian langsung tunai dari pengelolaan kekayaan alam ini.

*)Pajak: +)Yang kaya harus bayar pajak makin banyak, +)Menghapus doktrin kerahasiaan pajak yang banyak digunakan untuk melindungi hasil *copetan*, juga *permukahan* petugas dan wajib pajak.

*)Agama: kemerdekaan beragama maksudnya adalah agama apapun juga, karena negara ini kitab suci-nya ya konstitusi yang jelas-jelas mewajibkan negara melindungi kemerdekaan beragama dan beribadah setiap warga negaranya tak peduli betapa pun sesat dan bodohnya kepercayaan agamanya menurut warga lainnya. Tak boleh ada lagi penghakiman pada keyakinan. Selama bukan tindak kriminal yang merugikan pihak lainnya secara nyata maka negara harus melindungi. Titik...!

*)Pendidikan: +)Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas negara, salah satunya lewat pendidikan maka pendidikan adalah termasuk dalam daftar negatif investasi swasta. Maka negara harus membiayai pendidikan warganya hingga setidaknya level strata satu, +)Karena yayasan bukanlah badan usaha, karena pendidikan termasuk dalam daftar negatif investasi maka setiap penyelenggara pendidikan formal harus membuka laporan keuangannya. Hanya penyelenggara pendidikan formal ya... bukan penyelenggara kursus vokasional dan sejenisnya.

*)Otonomi Daerah: Karena Kepala Daerah itu bukan raja kecil, harus dikontrol ketat secara vertikal dan horisontal.

Nah, jika Anda bersepakat dengan yang hendak saya perjuangkan mari kita berjuang bersama. Harus ada salah satu dari kita yang maju dan menjadi *spokes person*. Untuk Daerah DKI Jakarta ijin kan saya yang maju. Akan lebih baik jika Anda mengajukan diri dari propinsi lain dengan program serupa saya. Nanti kita bahu-membahu di gedung sana...!

UU No. 8 Tahun 2012, Pasal 12, huruf p: “mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.” Pasal 13, ayat 3: “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.”

Segera fotokopi KTP DKI Jakarta Anda dan keluarga serta kawan. Bubuhkan tanda tangan asli sesuai KTP di bagian bawahnya sebagai tanda memberikan dukungan awal. Satu lembar dukungan sangat bermakna.

Kontak saya untuk diambil atau kirimkan ke sekretariat pengumpulan dukungan awal d/a:

Herlina Binduni, Gili Samping VI No. 24 RT 09/03 Kemanggisan, Jakarta Barat 11530